

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX

Endang Mahpudin

Faculty of Economics and Business
Singaperbangsa University Karawang
Email: endang@indosat.net.id

Abstract

Taxes have a direct impact on reduction of a company's profits. Tax levy which the government should do without harming the public. Given the management's desire to press and make the tax burden as small as possible, so the management tends to minimize tax payments. Earnings management is an effort made by the management to intervene in the preparation of financial statements in order to benefit himself, namely the related companies. This study aims to examine and obtain empirical evidence on the influence of tax planning on corporate earnings management practices included in the Jakarta Islamic Index. Population research was all the companies joined in the Jakarta Islamic Index. Sampling technique using purposive sampling, the sample with criteria of company that have audited financial statements and ended on December 31 and published in full from 2012-2016. Selection of selected samples of 28 companies. Data analysis using linear regression analysis. The results showed that tax planning had a significant positive effect on earnings management practices of companies included in the Jakarta Islamic Index with a magnitude of influence of only 8.9%. Hypothesis testing states the effect of tax planning on profit management practices. The value of the regression coefficient is positive which indicates that the higher from tax planning, will improve the practice of earnings management significantly. The influence of tax planning on earnings management practice is 8.9%. The implication of this research such as the management press and make the tax burden as small as possible, so the management tends to minimize the tax payment with various efforts, as long as the activity is still in the applicable taxation regulation.

Keywords: *profit management, tax planning, Jakarta Islamic Index*

1. Pendahuluan

Pajak berdampak langsung terhadap pengurangan keuntungan suatu perusahaan. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah harus dilaksanakan dengan tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan antara masyarakat dan pemerintah. Prinsip-prinsip dasar pemungutan pajak yaitu *equality*, *certainty*, *convenience*, dan *efficiency* (Hidayati, dkk. 2003). Adapun jenis-jenis tarif pajak adalah: tarif sebanding/ proporsional adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai

yang dikenai pajak, tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap, tarif progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar (Waluyo dan Ilyas, 2003).

Pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan beban pajak seoptimal mungkin (Mangunsong, 2002). Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasikan pajak sering disebut dengan teknik perencanaan pajak (*tax planning*) (Rori, 2013). *Tax planning* merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, yang penekanannya pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajak dengan tujuan mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah (Zain, 2006).

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008). Perencanaan pajak juga merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Beberapa upaya yang dilakukan manajemen dalam penghindaran pajak yaitu *tax avoidance*, *tax saving* dan optimalisasi kredit pajak (Prastowo, 2010). Dengan adanya perencanaan pajak tentu akan menghambat pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak dengan adanya perencanaan pajak. Selain itu biaya potensial dapat timbul dari perencanaan pajak yaitu *agency cost* yang dapat menyebabkan pemegang saham untuk mengurangi nilai perusahaan.

Dengan adanya perbedaan pelaporan antara laba komersil dengan laba fiskal akan menimbulkan konflik kepentingan (*agency theory*) bagi manajer dalam melaporkan aktivitas/kinerja perusahaan. Manajer (*agent*) akan melaporkan laba yang lebih tinggi dalam

laporan keuangan (laba komersil) dalam rangka mendapatkan kompensasi (bonus), atau terkait peraturan-peraturan dengan kontrak hutang (*debt covenant*). Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerial rent extraction yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai (Desai dan Dharmapala, 2009).

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait. Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, dan *income maximization* (Scoot, 2003). Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya.

Sejauh ini, hanya sedikit penelitian yang membahas pilihan strategi manajemen laba dan bagaimana berbagai tujuan dan motivasi mempengaruhi pilihan dari perspektif pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan penyajian kembali dengan sampel yang berbeda untuk menyelidiki pilihan manajemen laba yang sesuai dan manajemen laba yang tidak sesuai dengan motivasi dan tujuan yang berbeda. Hu¹, Cao, & Zheng (2015) memberikan perspektif baru dan bukti teoritis untuk mengeksplorasi pilihan perusahaan untuk melakukan manajemen laba yang sesuai dengan yang sesuai dan tidak sesuai. Mereka menemukan perusahaan yang memiliki motivasi untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan dan memiliki motivasi untuk menghindari biaya penalti yang terkait dengan kecurangan yang ditemukan, perusahaan lebih memilih untuk menerapkan strategi manajemen laba yang lebih sesuai.

Berdasarkan uraian yang ada di dalam latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori yang Melandasi Praktik Manajemen Laba

Munculnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dilandasi oleh dua teori, yaitu *agency theory* (teori keagenan) dan *positive accounting theory* (teori akuntansi positif).

a. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan pihak lain atau agent (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agent adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan principal kepadanya. *Agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. Agent termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent karena ketidakmampuan principal memonitor aktivitas agent dalam perusahaan. Sedangkan agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent dan dikenal dengan istilah asimetri informasi.

Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh principal dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent

b. *Positive Accounting Theory* (Teori Akuntansi Positif)

Teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori keagenan. Hal ini dikarenakan akuntansi teori positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu (1) antara manajemen dengan pemilik (*the bonus plan hypothesis*), (2) antara manajemen dengan kreditur (*the debt to equity hypothesis*), dan (3) antara manajemen dengan pemerintah (*the political hypothesis*).

2.2 Manajemen Laba

Scott (2003) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak uang, dan *political cost (opportunistic Earnings Management)*. Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (efficient Earning Management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melakukan manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba dan pertumbuhan laba sepanjangwaktu. Selain itu, dari beberapa definisi tersebut disimpulkan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh manajer tidak hanya dengan cara memaksimalkan laba tetapi juga dengan meminimalkan laba.

Ronen dan Yaari (2008) mendefinisikan manajemen laba sebagai:

“Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transaction to alter financial reports to either mislead some stakeholder about the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers.”

Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan kebijakannya dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan. Hal ini dilakukan manajer dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang berbeda kepada stakeholder mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga mempengaruhi hasil kontrak antara stakeholder dengan perusahaan. Bentuk-bentuk pengaturan laba yang dikemukakan oleh Scott (2003) yaitu:

- a. *Taking a bath* disebut juga *big baths*: bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya, laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.
- b. *Income minimization*. Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena *motif politik* atau *motif meminimumkan pajak*. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian

- secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan (*write off*) atas barang-barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.
- c. *Income maximization*. Maksimalkan laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*).
 - d. *Income smoothing*. Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.
 - e. *Timing Revenue dan Expenses Recognition*. Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

2.3 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak ini dilegalkan oleh pemerintah. Pada tahap awal perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan. Manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen.

2.4 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba

Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak principal dan manajemen sebagai pihak agent masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan

ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah (principal) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi agent meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Pada teori akuntansi positif dalam hipotesis ketiga yaitu *The Political Cost Hypothesis* (Scott, 2003) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

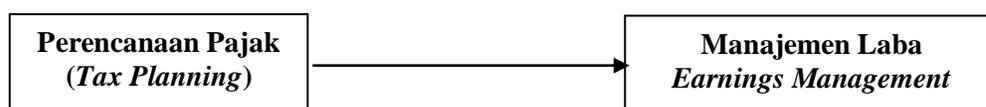
3. Pengembangan Hipotesis

Pada tahun 2009 tarif pajak perusahaan yang masuk bursa (*go public*) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%. Perubahan tarif tunggal PPh badan dari tahun 2009 ke tahun 2010 yang berlakuhingga saat ini memberikan insentif dan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba, dengan cara memperkecil laba kena pajak (*taxable income*), yang akan menyebabkan beban pajak perusahaan akan semakin kecil. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan berbagai upaya, sepanjang kegiatan tersebut masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hu¹, Cao, & Zheng (2015) yang menyatakan ketika terlibat dalam manajemen laba, perusahaan yang

terdaftar akan menukar manajemen pendapatan yang sesuai dan tidak sesuai dari perspektif biaya pajak penghasilan. Mereka menemukan bahwa motivasi dan tujuan manajer akan mempengaruhi pilihan. Ketika perusahaan memiliki motivasi untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan dan memiliki motivasi untuk menghindari biaya penalti yang terkait dengan kecurangan yang ditemukan, perusahaan lebih memilih untuk menerapkan strategi manajemen laba yang lebih sesuai Berdasarkan hasil pengujian Chen, Dhaliwal, & Trombley (2007) terhadap pengaruh perencanaan pajak dan manajemen laba atas pendapatan kena pajak, kami menyimpulkan bahwa perusahaan perencanaan pajak yang tinggi memiliki pendapatan kena pajak yang relatif kurang informatif dibandingkan dengan perusahaan perencanaan pajak yang rendah. Perusahaan dengan manajemen laba tinggi memiliki pendapatan buku kurang informatif daripada perusahaan dengan manajemen berpendapatan rendah, yang mengendalikan perencanaan pajak. Mereka juga menemukan efek silang yang konsisten untuk pendapatan buku dan perencanaan pajak, yaitu keakuratan pendapatan buku dikurangi dengan adanya perencanaan pajak yang agresif. Hasil ini kontras dengan Ayers et al. (2006), yang menemukan bahwa kandungan informasi pendapatan kena pajak terhadap pendapatan buku relatif jauh lebih rendah untuk perusahaan perencanaan pajak yang tinggi dan secara signifikan lebih tinggi untuk perusahaan dengan kualitas pendapatan rendah berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.



Gambar 1. Model Penelitian

4. Metode Penelitian

4.1 Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan kriteria perusahaan yang mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit dan berakhir pada 31 Desember dan dipublikasikan secara lengkap dari tahun 2012-2016.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data laporan keuangan dan laporan tahunan. Data diperoleh dari situs www.idx.co.id dan dari situs

masing-masing perusahaan. Data tarif pajak diperoleh dari dirjen pajak yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pajak.

4.2 Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *earnings management*. Manajemen laba diukur dengan menggunakan *Discretionary Accruals* (DA), jika pada suatu kondisi di mana pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal bagi perusahaan, oleh sebab itu *discretionary accrual* digunakan untuk mengukur manajemen laba.

Discretionary accrual dihitung menggunakan *Modified Jones Model* karena berdasar Dechow et al. (1995) model ini lebih baik dibanding model Jones standar dalam mengukur kasus manipulasi pendapatan. Model ini mengurangkan *nondiscretionary accruals* terhadap *total accruals* sehingga diperoleh *discretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan direayasa sesuai dengan kebijakan (*discretion*) manajerial, misalnya pada akhir tahun buku perusahaan mengetahui bahwa suatu piutang tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan dapat melakukan pencatatan kapan piutang tersebut dihapuskan, pada periode buku sekarang atau pada tahun buku berikutnya; perubahan biaya kerugian piutang yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen dalam penentuan biaya kerugian piutang dapat dijadikan contoh *discretionary accruals*.

Model penghitungannya adalah sebagai berikut (Dechow et al. 1995), mengukur total akrual:

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

Kemudian menghitung nilai *nondiscretionary accrual* (NDTA) yang diestimasi dengan persamaan regresi berikut:

$$NDTA = \beta_1(1 / TA_{it}) + \beta_2(\Delta REV_{it} / TA_{it}) + \beta_3(PPE_{it} / TA_{it}) + \varepsilon$$

Earnings Management (EM) yang dihitung sebagai berikut:

$$EM = (TAC / TA) - NDTAC$$

Keterangan:

EM = Discretionary accrual perusahaan i pada periode t

NI_{it} = Net income perusahaan i pada periode t

TAC_{it} = Total accrual perusahaan i pada periode t

CFO_{it} = Aliran arus kas operasi perusahaan i pada periode t

TA_{it} = Total aktiva perusahaan i pada periode t

ΔREV_{it} = Perubahan penjualan perusahaan i pada periode t
 PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada periode t
 ε_{it} = error

Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak. Variabel perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004). Ukuran efektivitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektivitas perencanaan pajak. Rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) adalah:

$$TRR_{it} = \frac{\text{Net income}_{it}}{\text{Pretax Income (EBIT)}_{it}}$$

Keterangan:

TRR_{it} = *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t.

Net Income_{it} = Laba bersih perusahaan i pada tahun t.

$\text{Pretax Income (EBIT)}_{it}$ = Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t.

4.3 Metode Analisis Data

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis hasil penelitian dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh dalam bentuk tabulasi agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Hasil penelitian dapat disajikan ke dalam bentuk tabel statistik deskriptif yang memuat mean, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.

Teknik analisis data inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi sehingga cocok untuk penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

Persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X + e$$

Keterangan:

a : konstanta

b : koefisien variabel

X : Perencanaan pajak

Y_1 : Manajemen Laba

e : residual

5. Hasil Dan Diskusi

5.1 Analisis Deskriptif

Tabel 1. Analisis Deskriptif

| Variabel | Tahun | Mean | Std. Deviation | Minimum | Maximum |
|----------|-------|--------|----------------|---------|---------|
| TRR | 2012 | 0,003 | 0,072 | -0,230 | 0,130 |
| | 2013 | -0,015 | 0,093 | -0,280 | 0,120 |
| | 2014 | -0,009 | 0,069 | -0,130 | 0,170 |
| | 2015 | 0,008 | 0,052 | -0,140 | 0,110 |
| | 2016 | 0,013 | 0,050 | -0,070 | 0,130 |
| | Total | 0,001 | 0,069 | -0,280 | 0,170 |
| EM | 2012 | 0,732 | 0,145 | 0,208 | 1,000 |
| | 2013 | 0,659 | 0,291 | 0,017 | 1,223 |
| | 2014 | 0,695 | 0,253 | 0,001 | 1,000 |
| | 2015 | 0,780 | 0,410 | -0,259 | 2,054 |
| | 2016 | 0,775 | 0,205 | 0,133 | 1,028 |
| | Total | 0,728 | 0,276 | -0,259 | 2,054 |

Dari hasil statistik deskriptif tahun 2012 hingga 2016 di atas, diperoleh informasi sebagai berikut

- Hasil statistik deskriptif perencanaan pajak tahun 2012-2016 menunjukkan nilai minimum sebesar -0,208, nilai maksimum 0,170, nilai rata-rata sebesar 0,001 dan nilai standar deviasi sebesar 0,069. Kecenderungan perencanaan pajak meningkat dari tahun 2013 sampai 2016, sedangkan pada tahun 2012 sampai 2013 mengalami penurunan. Perencanaan pajak meningkat 0,6% pada tahun 2014 menjadi 1,7% pada tahun 2015.
- Hasil statistik deskriptif manajemen laba tahun 2012-2016 menunjukkan nilai minimum sebesar -0,259, nilai maksimum 2,054, nilai rata-rata sebesar 0,728 dan nilai standar deviasi sebesar 0,276. Data manajemen laba pada perusahaan yang diteliti cenderung meningkat dari tahun 2013 sampai 2016, sedangkan pada tahun 2012 sampai 2013 mengalami penurunan. Manajemen laba meningkat 3,6% pada tahun 2014 menjadi 8,5% pada tahun 2015.

5.2 Analisis Regresi

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana menggunakan SPSS 21. Berikut hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardiz Coefficient | t | R ² | F |
|---------------------|-----------------------------|------------|------------------------|-------|----------------|--------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 (Constant) | -0,055 | 0,016 | | | | |
| TRR | 0,075 | 0,021 | 0,298 | 3,632 | 0,089 | 13,191 |

* signifikan pada tingkat signifikansi 5%

H₁: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik analisis regresi pada Tabel 2 diperoleh nilai estimasi 0,075 dengan t-value 3,632. Oleh karena nilai p-value <0,05 maka hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan *Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba* terdukung. Nilai R² sebesar 0,089 menunjukkan bahwa pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba relatif kecil, yaitu hanya 8,9%.

5.3 Diskusi

Pajak penghasilan merupakan salah satu sektor pajak yang paling besar menyumbang penerimaan negara. Pada tahun 2009, tarif PPh Badan mulai menganut sistem tarif tunggal (single tax) yaitu sebesar 28%, yang sebelumnya menggunakan sistem tarif berlapis. Mulai tahun 2010, tarif PPh Badan mengalami penurunan menjadi 25% dan berlaku hingga saat ini. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (go public) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa (go public) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%. Karena adanya perubahan (penurunan) tarif tunggal PPh badan dari tahun 2009 ke tahun 2010 yang berlaku hingga saat ini, hal ini dapat memberikan insentif dan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba, dengan cara memperkecil laba kena pajak (taxable income), yang akan menyebabkan beban pajak perusahaan akan semakin kecil. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan berbagai upaya, sepanjang kegiatan tersebut masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning).

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumomba (2010) yang berhasil membuktikan bahwa perencanaan pajak yang diukur menggunakan tingkat retensi pajak mampu mendeteksi praktik manajemen laba, dalam rangka merespon perubahan tarif pajak dari 28% ke 25% sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan menghindari penurunan laba. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Philips et al. (2003), di mana hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba yang ditunjukkan dengan besarnya nilai mean variabel manajemen laba yang menunjukkan angka positif (0,728). Angka mean variabel manajemen laba yang positif itu menunjukkan kecenderungan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba. Philips et al. (2003) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak tanggungan yang menjadi elemen di dalam perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa perencanaan pajak berguna dalam memprediksi manajemen laba, di mana teori tersebut biasa disebut dengan teori titik perubahan laba nol.

Hasil pengujian koefisien determinasi yang menggunakan R-square juga memperlihatkan bahwa porsi pengaruh perencanaan pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index ini sangatlah kecil atau sangatlah lemah. Nilai R-Square pada penelitian ini sebesar hanya sebesar 0,089 atau sama dengan 8,9%, yang berarti bahwa variasi perubahan variabel dependen (EM) dapat dijelaskan oleh variabel independen (TRR) sebesar 8,9% dan sisanya sebesar 91,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Semakin tinggi nilai R-Square dari hasil suatu regresi, maka hubungan variabel independen dan variabel dependen dalam suatu penelitian akan kuat pula.

Kecilnya pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index, penulis menduga karena perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index kurang merespon penurunan tarif pajak dari 28% ke 25% yang mulai berlaku efektif mulai tahun 2010. Karena rentang waktu penurunan tarif PPh badan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 hanya berselang 1 tahun (tahun pajak 2009-2010), perusahaan yang

terdaftar di Jakarta Islamic Index menjadi kurang siap dan kurang maksimal untuk menggeser periode biaya atau pendapatan yang sebenarnya akan memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan dalam rangka melakukan manajemen laba.

6. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan Penelitian

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba dengan besarnya pengaruh hanya sebesar 8,9%. Nilai koefisien regresi bernilai positif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi perencanaan pajak, maka akan meningkatkan praktik manajemen laba secara signifikan.

6.2 Implikasi

Implikasi hasil penelitian yaitu pihak manajemen menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan berbagai upaya, sepanjang kegiatan tersebut masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

6.3 Saran

Bagi peneliti selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah menambah periode tahun penelitian, sehingga akan banyak perusahaan yang menjadi sampel penelitian dan dapat memasukkan industri keuangan, khususnya bank di dalam sampel penelitian agar sampel yang diperoleh semakin banyak serta hasil dari penelitian sejenis semakin baik. Hal ini dikarenakan pada penelitian sejenis sebelumnya, industri keuangan belum pernah dipakai dalam sampel penelitian mengenai manajemen laba.

Daftar Pustaka

- Ayers, B. C., Jiang, J., & Laplante, S. K. (2009). Taxable Income as Performance Measure: The Effects of Tax Planning and Earnings Quality. *Contemporary Accounting Research*, 26 (1), 15-54.
- Chen, Linda H. and Dhaliwal, Dan S. and Trombley, Mark A., 2007. The Impact of Earnings Management and Tax Planning on the Information Content of Earnings (November 2007). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1028808>.
- Desai, A. M., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of Economics and Statistics*, p.537-546.

- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high - powered incentives. *Journal of Financial Economics* 79 , pp. 145 - 179.
- Hanlon, Michelle., & Heitzman, Shane. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50 (40). 127 – 178.
- Hidayati, Siti Munfiah dan Zulaikha. 2003. Analisis Perilaku Earnings Management: Motivasi Minimalisasi Income Tax. Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Hu, N., Cao, Q., & Zheng, L. 2015. Listed Companies' Income Tax Planning and Earnings Management: Based on China's Capital Market. *Journal of Industrial Engineering and Management*. *JIEM*, 2015 – 8(2): 417-434.
- Mangunsong, S. 2002. Peranan Tax Planning dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 2 (2): 44-54.
- Minnick, Kristina., & Noga, Tracy. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. *Journal of Corporate Finance*, 16, 703-718.
- Philips, John, Morton Pincus, and Sonja Olhoft Rego. 2003. Earnings Management : New Evidence Based on Deferred Tax Expense. *The Accounting Review*, Vol. 27, p.491-522.
- Rori, Handri. 2013. Analisis Penerapan Tax planning Atas Pajak Penghasilan Badan, *Jurnal EMBA*, Vol.1 (3): 410-418.
- Scott, William R. 2003. *Financial Accounting Theory*. Second edition. Canada: Prentice Hall.
- Suandy, Erly. 2008, *Hukum Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sumomba, Christina Ranty. 2010. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.